

ABSTRAK

Studi Kasus Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE Yang Menggunakan Konten Elektronik Sebagai Alat Pembuktian dikemudian hari, Omen Marpicel Tapatab Nim 22310201. Pokok permasalahan yang penulis ingin teliti pada penelitian ini adalah Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) Terhadap Terdakwa sedangkan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi memutus pemidanaan terhadap terdakwa dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) Terhadap Terdakwa sedangkan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi memutus pemidanaan terhadap terdakwa dan Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Variabel penelitian ada dua yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: Alasan Hakim Pengadilan Negeri Memutus Bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa, Alasan Hakim Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi Memutus Pemidanaan terhadap Terdakwa dan alasan Mahkamah Agung pada tingkat PK menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ITE yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Penelitian ini menganalisis pertimbangan pertimbangan hukum antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi serta Peninjauan Kembali dalam Tindak Pidana ITE yang menggunakan konten elektronik sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari Tuntutan JPU dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur delik “mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik”. Namun, pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri sehingga menjatuhkan pemidanaan terhadap karena menilai adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dianggap tidak mencerminkan asas keadilan serta kepastian hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik pasal dakwaan. Lebih lanjut Pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Menolak Permohonan PK dari terpidana karena MA menilai jika pengadilan tingkat kasasi sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut dianggap sah dan mengikat, MA juga menambahkan jika Permohonan PK dari Pemohon Juga tidak Memenuhi Syarat Formil dalam pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

Kata Kunci: Tindak Pidana ITE, Konten Elektronik, Pembuktian

ABSTRACT

A Case Study on Judicial Rulings Regarding Perpetrators of ITE (Electronic Information and Transactions) Crimes Involving the Use of Electronic Content as Evidence: Omen Marpicel Tapatab (Student ID 22310201). The core issues the author intends to examine in this study are: Why did the District Court Judge acquit (*vrijspraak*) the defendant, whereas the Supreme Court Judge at the cassation stage ruled to convict and sentence the defendant? And why did the Supreme Court Judge at the Judicial Review stage reject the convicted person's application for Judicial Review? The objective of this research is to determine the reasons behind the District Court Judge's acquittal of the defendant, the Supreme Court Judge's decision to convict and sentence the defendant at the cassation stage, and the Supreme Court Judge's rejection of the convicted person's Judicial Review application. This research is descriptive in nature; the researcher describes, outlines, and explains a situation or event as clearly as possible without manipulating the object of study. The study employs a normative-juridical research method specifically, librarybased legal research conducted by examining literature or secondary data. There are two research variables: the independent variable and the dependent variable. The independent variable is the factor constituting the core issue to be investigated. In this study, the independent variables are: the reasons for the District Court Judge's acquittal of the defendant; the reasons for the Supreme Court Judge's decision to convict and sentence the defendant at the cassation stage; and the reasons for the Supreme Court's rejection of the convicted person's Judicial Review application at the PK stage. The dependent variable is the variable that is influenced or that arises or occurs as a result of the independent variable. In this study, the dependent variable is the judicial ruling concerning the perpetrator of an ITE crime involving the use of electronic content as evidence. This study analyzes the conflicting legal considerations between the District Court and the Supreme Court at the Cassation and Judicial Review levels in ITE Crimes that use electronic content as evidence in the future. The Panel of Judges at the District Court decided to acquit the defendant from the Public Prosecutor's Charges on the grounds that the Defendant's actions did not fulfill the elements of the crime of "transmitting, distributing or making accessible electronic information". However, at the Cassation level, the Panel of Judges at the High Court overturned the decision and tried the case themselves, thus sentencing him to a criminal offense because they considered there was an error in the District Court's legal considerations which were deemed not to reflect the principles of justice and legal certainty. The Supreme Court was of the opinion that the defendant's actions had fulfilled the elements of the crime of the indictment. Furthermore, at the Judicial Review Level, the Supreme Court rejected the PK Application from the convict because the Supreme Court considered that the cassation level court was correct and correct so that the decision was considered valid and binding, the Supreme Court also added that the PK Application from the Applicant also did not fulfill the Formal Requirements in Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: ITE Crimes, Electronic Content, Evidence